

## **Radikalisme Pada Komunitas Non-Islam**

Angel Damayanti – angel.damayanti@uki.ac.id  
Universitas Kristen Indonesia

### **Pendahuluan**

Maraknya serangan bom dan aksi tembak-menembak yang terjadi di berbagai negara belakangan ini seringkali dicap sebagai bentuk terorisme yang dilatarbelakangi oleh radikalisme agama. Dari berbagai kejadian tersebut, banyak pihak yang kemudian menuding aksi tersebut dilakukan oleh kelompok-kelompok garis keras berlandaskan agama Islam, seperti Al Qaeda, ISIS atau *Daesh*, Boko Haram, Abu Sayyaf dan afiliasi kelompok-kelompok tersebut di berbagai negara. Namun, sesungguhnya tindakan radikal dan aksi teror juga dilakukan oleh kelompok dengan latar belakang agama lainnya. Seperti misalnya ledakan bom yang terjadi di Malegaon, Maharashtra dan di Modasa, Gujarat di India pada 29 September 2008 yang menewaskan 8 orang dan melukai lebih dari 80 orang yang mayoritas beragama Islam. Menurut otoritas setempat, aksi ini dilakukan oleh kelompok garis keras di India dengan latar belakang agama Hindu.

Hal yang sama juga terjadi di Myanmar, dimana sejumlah rahib beragama Buddha melakukan aksi kekerasan terhadap warga Rohingya yang beragama Islam, mulai dari tindakan diskriminasi hingga pengusiran paksa dari tempat tinggal mereka. Anehnya, pemerintah Myanmar sepertinya membiarkan hal ini terjadi dan bahkan dianggap mendukung gerakan kelompok radikal Buddha tersebut. Begitu pula dengan kelompok teroris dan radikal Kristen seperti *Army of God* dan *Ku Klux Klan* di Amerika Serikat yang kerap melakukan tindak kekerasan dan bahkan membunuh masyarakat yang dianggap berbeda dengan iman Kekristenan mereka. Kelompok radikal Kristen lainnya juga hadir di beberapa negara seperti *The Lord's Resistance Army* (LRA) di Uganda, *The National Liberation Front of Tripura* di India. Bahkan ada pula yang menyebutkan kelompok radikal Kristen muncul di Indonesia ketika terjadi konflik antar agama pada akhir tahun 1990 di Poso dan Ambon, seperti Laskar Kristus dan Pasukan Kelelawar, dan di Papua belakangan ini.

Itu sebabnya, tulisan ini akan mengulas lebih dalam tentang kelompok-kelompok radikal non-Muslim yang ada, baik di level internasional maupun nasional; siapa mereka, apa aktivitas mereka, apa yang melatarbelakangi dan bagaimana pemerintah negara-negara tersebut, khususnya pemerintah Indonesia meresponi fenomena tersebut. Untuk membahas isu tersebut, tulisan ini akan dibagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama, tulisan ini akan membahas tentang fenomena global radikalisme non-Islam, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang radikalisme non-Islam di Indonesia terkait dengan latar belakang pembentukan, ideologi dan kecenderungan perkembangannya. Pada bagian ini, penulis akan lebih fokus pada kelompok radikal Kristiani yang ada di Indonesia. Kemudian, penulis akan menjelaskan tentang strategi yang telah digunakan baik oleh pemerintah maupun pihak lainnya dalam mengatasi kelompok radikal yang berasal dari kelompok non-Muslim. Pada bagian akhir, penulis juga memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat membantu pemerintah khususnya Kementerian Agama dalam menyusun program pencegahan dan penanggulangan radikalisme agama, khususnya Non-Islam, yang kemudian diakhiri dengan epilog.

### **Fenomena Global Radikalisme Non-Islam**

Secara historis, radikalisme kerap dikaitkan dengan aktivitas politik yang digunakan oleh sekelompok orang yang ingin melakukan perubahan secara mendasar terhadap kehidupan sosial politik yang ada di sekitar mereka. Revolusi Perancis (1789-1799) misalnya dianggap sebagai bentuk radikalisme karena menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam hal sosial dan politik di Perancis. Peristiwa ini kemudian mendorong munculnya prinsip-prinsip liberalisme seperti penghormatan HAM dan perubahan bentuk sistem politik di negara tersebut. Namun, dalam perkembangannya, radikalisme kemudian dikaitkan dengan agama dan/atau aktivitas dari agama tertentu. Belakangan, bahkan radikalisme dihubungkan dengan perilaku radikal dari kelompok agama tertentu terhadap kelompok lainnya yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip atau nilai-nilai dalam agama mereka.

Kata radikal itu sendiri berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar dan *radicalis* yang berarti berakar, mengakar atau memiliki akar. Itu sebabnya, tanpa ada tendensi untuk mengartikan kata ini secara negatif, beberapa kamus berbahasa

Inggris mengartikan radikal sebagai sebuah upaya perubahan secara mendasar atau perubahan untuk kembali kepada akar/dasar. Kamus bahasa Inggris Cambridge misalnya, mengartikan radikal sebagai sebuah perubahan yang terjadi secara besar-besaran dan keyakinan akan perlunya perubahan besar-besaran dalam kehidupan sosial dan politik. Meskipun dikaitkan dengan perubahan, tidak mudah untuk memahami apa yang dimaksud dengan radikal karena perubahan mengakar seperti apa sesungguhnya yang diinginkan, bagaimana cara melakukan perubahan tersebut dan apa tujuan perubahan tersebut kerap menimbulkan pemahaman yang beragam.

Agak berbeda dengan kamus Bahasa Inggris, kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengaitkan kata radikalisme hanya dengan aktivitas politik dan mengartikannya sebagai: (1) sebuah paham atau aliran yang radikal di politik, (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, dan (3) sikap ekstrem di aliran politik. Namun, sejalan dengan semangat yang menghubungkan radikalisme politik dengan aktivitas sosial termasuk agama, maka radikalisme ini dapat juga dilihat sebagai upaya suatu kelompok agama tertentu untuk mendapatkan kekuasaan dan/atau merubah bentuk kekuasaan suatu negara dengan cara kekerasan, di mana kelompok tersebut menggunakan symbol dan/atau ajaran agama tertentu demi mencapai tujuannya dan mendapatkan manfaat dari penggunaan simbol/agama tersebut.

Mengenai radikalisme dalam agama, sebagian orang menganggap bahwa ibarat uang logam, agama memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, agama mengajarkan kebaikan dan mendatangkan rahmat dan berkat bagi umat manusia. Namun di sisi lain, agama juga memiliki daya rusak dan dapat menimbulkan kehancuran. Terkait hal ini, Peter Berger (2005) dalam tulisannya, "Religion and Global Civil Society" menyimpulkan bahwa ketika agama telah terinstitusionalisasi maka konflik yang merusak semua sendi kehidupan manusia dapat dengan mudah terjadi. Dengan kata lain, ketika agama tidak lagi dipandang sebagai sebuah perwujudan iman percaya dan hubungan yang hakiki antara Tuhan dengan umat ciptaan-Nya, tetapi dipandang sebagai sebuah institusi yang di dalamnya memiliki seperangkat aturan, norma dan sanksi, maka agama sangat mungkin menjadi sumber konflik, baik itu konflik antar agama maupun konflik intra

agama. Hal ini disebabkan karena para pengikut agama tersebut akan berusaha agar aturan dan ajaran agama merekalah yang dijadikan sebagai pedoman bagi semua.

Bagi para sosiolog seperti Berger dan Juergensmeyer, sama seperti nilai-nilai sosial dan tradisi dalam masyarakat, agama dianggap sebagai produk dari manusia. Agama terbentuk sebagai akibat dari perilaku dan interaksi antar manusia yang tinggal di dalam satu kelompok tertentu. Agama kemudian dipandang sebagai sebuah proses dimana orang-orang hidup, tinggal dan saling berinteraksi di dalamnya. Pada satu titik tertentu dalam proses tersebut, agama yang sebelumnya merupakan produk dari manusia dan interaksinya, kemudian berubah fungsi menjadi alat kontrol bagi manusia itu sendiri melalui aturan-aturan yang ada. Bahkan agama dapat digunakan oleh manusia untuk mengatur dan mengendalikan sesamanya. Di sinilah agama kemudian dianggap sebagai institusi yang mengontrol orang-orang yang ada di dalamnya. Sebagai sebuah institusi, agama dapat membuat para pengikutnya untuk melakukan berbagai cara, mulai dari cara yang paling halus hingga melakukan aksi kekerasan, demi mencapai tujuan dan kepentingan mereka.

Berbicara tentang aksi radikalisme yang dilatarbelakangi agama, banyak pihak yang menuding kelompok-kelompok militan dan teroris saat ini banyak dimotivasi oleh agama Islam. Sebut saja misalnya kelompok Al Qaeda, *Islamic State of Iraq and Sham* (ISIS atau beberapa negara juga menyebutnya dengan *Islamic State* dan *Daesh*), Boko Haram, Abu Sayaff, dan Al Shabaab. Kelompok-kelompok ini kerap mengutip ayat-ayat Al Quran atau simbol-simbol dalam agama Islam untuk mendukung pergerakan dan aksi kelompok mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa akibat perbuatan mereka, banyak korban berjatuhan baik nyawa maupun material. Tidak sedikit juga strategi dan upaya pemerintah dilakukan untuk menghentikan aksi-aksi kelompok ini. Mulai dari pencegahan, penembakan dan penangkapan para pelaku hingga pembinaan terhadap mereka yang mendukung gerakan ini termasuk keluarga dan anak-anak pelaku, serta upaya mengembalikan eks nabi teroris ke dalam masyarakat.

Namun sesungguhnya aksi terorisme yang dilatarbelakangi oleh agama, tidak hanya terjadi dalam agama Islam. Beberapa agama lainnya dengan jumlah pengikut yang besar atau setidaknya sebagai warga mayoritas dalam sebuah negara juga

melakukan hal yang sama di berbagai negara, meskipun kebanyakan dilakukan hanya pada level nasional. Namun demikian, gerakan radikal kelompok agama tertentu di suatu negara dapat mempengaruhi kelompok agama tertentu maupun agama lain di negara lainya. Seperti misalnya gerakan kelompok radikal Buddha di Myanmar dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap umat Islam mampu memicu kemarahan kelompok Islam yang ada di Indonesia dan mempengaruhi kehidupan umat beragama di negara ini. Di bawah ini adalah gambaran dari gerakan-gerakan radikal yang dilatarbelakangi oleh agama-agama selain agama Islam di berbagai negara di dunia dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal non-Islam tersebut dengan menggunakan simbol-simbol agama sekaligus juga politik sebagai latar belakang dan pembedanya.

### ***1. Radikalisme dalam Agama Yahudi***

Beberapa catatan menunjukkan radikalisme dalam agama Yahudi, merupakan salah satu bentuk radikalisme yang telah lama ada, meskipun agak sulit memisahkan antara aksi radikal yang dilatarbelakangi agama dengan etnis dan politik Yahudi karena ketiganya saling berkaitan. Radikalisme yang dilatarbelakangi agama dan politik Yahudi dapat ditarik ke belakang hingga abad I M. Kelompok Yahudi radikal saat itu yang dikenal dengan nama Zelot sangat keras menentang Kekaisaran Romawi yang menduduki wilayah Yudea, sekaligus juga tegas dalam menjaga tradisi agama Yahudi mereka. Anggota kelompok Zealot yang paling radikal, atau yang biasa disebut Sicarii, seringkali berjalan-jalan di tempat keramaian seperti pasar atau tempat-tempat ibadah dengan menggunakan jubah sambil membawa pisau kecil di balik jubah mereka. Pisau kecil itu mereka gunakan untuk menusuk orang-orang Romawi atau para pendukungnya serta orang-orang Yahudi yang dianggap telah murtad dari ajaran agamanya atau membelot dan bekerjasama dengan orang Romawi. (Hoffman, 2006; Pedazhur & Perliger, 2009; Hendropriyono, 2009)

Setelah negara Israel secara politik terbentuk pada tahun 1948, sejumlah aksi radikal dan terorisme atas nama agama Yahudi tetap terjadi. Umumnya kelompok-kelompok radikal yang ada pada saat itu menginginkan agar negara Israel berdiri dengan menggunakan agama Yahudi sebagai landasannya. Kelompok Brit

HaKana'im misalnya, sangat menentang munculnya sekularisasi di negara Israel dan kerap melakukan aksinya sepanjang tahun 1950-1953. Mereka memaksa agar negara Israel yang baru lahir menggunakan hukum-hukum agama Yahudi sebagai landasannya. Pada saat yang sama, kelompok Malchut Yisrael, juga melancarkan aksi penyerangan terhadap fasilitas-fasilitas diplomatik Uni Sovyet dan menembaki tentara Yordania yang berjaga di sepanjang garis perbatasan Yerusalem. Kelompok ini juga terbukti telah mencoba melakukan pengemboman terhadap Kementerian Pendidikan Israel pada tahun 1953 karena dianggap telah mencemari nilai-nilai dan tradisi Yahudi dengan nilai-nilai sekuler.

Memasuki tahun 80-an, aksi-aksi kekerasan di Israel kerap dilakukan oleh kelompok dari aliran ultra-ortodox Yahudi yang menolak terjadinya asimiliasi dan integrasi antara penduduk Yahudi murni dengan para pendatang dari negara lain yang merupakan orang-orang keturunan Yahudi atau mereka yang telah melakukan kawin campur dengan suku bangsa lainnya. Beberapa organisasi seperti Lehava, Sikrikim, dan Kach dan Kahane Chai bahkan dicap sebagai kelompok teroris oleh Pemerintah karena mereka menyebarkan kebencian terhadap mereka yang berasal dari etnis dan agama bukan Yahudi. Beberapa aksi kekerasan yang dilakukan atas nama radikalisme agama Yahudi, di antaranya adalah:

1. Pada tahun 1994, Baruch Goldstein, anggota kelompok Kach dan Kahane, menembakkan lebih dari 100 peluru dan membunuh 30 warga Palestina serta melukai 125 orang lainnya yang sedang bersembahyang di Mesjid Ibrahim di Hebron. Goldstein sendiri kemudian tewas ditembak oleh salah seorang warga yang ada di tempat kejadian. Setelah peristiwa itu, pemerintah Israel akhirnya melarang organisasi Kach dan Kahane beraktivitas di wilayah Israel. (<http://news.bbc.co.uk>)
2. Pembunuhan terhadap Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada tanggal 4 November 1995 oleh Yigal Amir, seorang mahasiswa Fakultas Hukum yang juga anggota kelompok radikal Eyal. Kelompok ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Kahane dan menganggap pembunuhan terhadap pemimpin negara Israel ini dapat dibenarkan karena Rabin dianggap membahayakan warga Yahudi melalui kebijakannya yang memberikan otoritas lebih besar kepada

Palestina di wilayah Tepi Barat dan menandatangani Perjanjian Damai Oslo. (<http://www.nytimes.com>)

3. Penembakan Pusat Gay di Tel Aviv pada tahun 2009 yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal menyebabkan 2 orang tewas dan 16 lainnya luka-luka. Beberapa hari setelah kejadian ini Yaakov Teitel, seorang Yahudi yang pindah dari Amerika Serikat ke Israel pada tahun 1999, ditangkap karena memasang poster yang memuji aksi penembakan tersebut. Belakangan diketahui bahwa Teitel juga pernah melakukan sejumlah teror seperti memasang bom di pipa rumah seorang akademisi Zeev Sternhell, membunuh supir taksi yang berasal dari palestina pada tahun 1997, dan beberapa kali memasang bom di rumah-rumah pemimpin agama Kristen dan perumahan warga Kristen. Teitel diperkirakan beroperasi sendiri dan tidak berafiliasi dengan kelompok radikal manapun di Israel. (<http://www.haaretz.com>)
4. Serangan Duma Arson pada bulan Juli 2015, yang dilakukan oleh Amiram Ben-Uliel terhadap sebuah keluarga Palestina di wilayah Duma. Amiram merupakan anggota gerakan Yahudi Ortodoks bernama Chabad-Lubavitch yang percaya bahwa Rabi Menachem Mendel Schneerson yang meninggal pada tahun 1994 adalah mesias yang akan kembali ke dunia untuk membangun Kerajaannya di dunia ini. Akibat serangan ini, sepasang suami, istri dan putra mereka yang baru berusia 18 bulan tewas dan beberapa anggota keluarga lainnya luka-luka. (<http://www.jpost.com>)

Aksi gerakan radikal dalam agama Yahudi tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap radikalisme non-Islam di negara-negara lainnya. Bisa jadi karena jumlah penganut agama Yahudi tidak besar secara global dan dampak sosial politik dari radikalisme agama ini bersifat lokal. Sehingga aksi dan gerakan dari kelompok radikal agama Yahudi hanya mempengaruhi situasi di dalam negeri negara Israel.

## ***2. Radikalisme dalam Agama Hindu***

Agama Hindu dianggap sebagai agama tertua di dunia yang mulai berkembang bersamaan dengan munculnya peradaban di Sungai Hindustan, India pada abad XV SM. (Levinson, 1998) Artinya, praktek-praktek agama ini telah ada sebelum agama-

agama monotheisme seperti Yahudi, Kristen dan Islam lahir. Saat ini, pemeluk agama Hindu menempati posisi ketiga terbanyak setelah agama Kristen dan Islam, dengan jumlah kurang lebih 1 milyar orang atau sekitar 15% dari penduduk dunia. (<http://www.worldometers.info/world-population/#religions>) Sembilan puluh empat persen (94%) dari pemeluk agama Hindu tinggal di negara India. Sebagian kecil lainnya tersebar di beberapa negara seperti Afrika Selatan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, dan Indonesia (Bali). Sampai sekitar 1 dekade yang lalu, gerakan radikal dalam agama Hindu tidak mendapat perhatian khusus. Hal ini bisa jadi dikarenakan negara-negara di dunia lebih terfokus pada serangan kelompok teroris lainnya yang dampak serangannya lebih besar dan mendunia, seperti Al Qaeda dan jaringannya di berbagai tempat.

Aksi kelompok radikal Hindu di India baru mendapat perhatian, setelah pada tahun 1999, seorang misionaris Kristen asal Australia bernama Graham Saines bersama kedua anak laki-lakinya dibakar hidup-hidup di Orissa. Kejadian ini kemudian berlanjut di mana pada tahun 2002, kelompok yang sama melakukan pembantaian umat Muslim dan pembakaran rumah warga di Gujarat. (<http://www.hudson.org>). Peristiwa ini menyebabkan 790 warga Muslim dan 254 warga Hindu meninggal dunia, lebih kurang 2500 orang terluka dan 223 orang lainnya dilaporkan hilang. (<http://news.bbc.co.uk>)

Kelompok masyarakat Kristen dan Islam di India memang kerap diancam dan mengalami kekerasan dari kelompok radikal agama Hindu. Kebencian terhadap kelompok masyarakat Islam dan Kristen ini terjadi karena baik umat Islam maupun Kristen dianggap telah mengancam umat Hindu melalui aktivitas dakwah serta program misi mereka di beberapa wilayah. Para misionaris Kristen dianggap telah menyebarkan agama Kristen dan melakukan Kristenisasi sehingga menyebabkan sejumlah penganut agama Hindu berpindah agama menjadi penganut agama Kristen. Sedangkan umat Islam dianggap berbahaya karena jumlah pertambahan dan angka kelahiran mereka yang pesat dan tinggi.

Pemerintah India menganggap peristiwa Gujarat hanya sebagai kerusuhan dan konflik komunal biasa. Namun, beberapa pengamat melihat hal ini sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan secara terorganisir oleh kelompok nasionalis-agama Hindu



yang bercita-cita ingin mendirikan negara berlandaskan agama dan tradisi/budaya Hindu. Kelompok nasionalis-agama Hindu yang diduga menjadi dalang dari kerusuhan Gujarat tersebut, adalah *Sangh Parivar*, sebuah kelompok yang berafiliasi atau setidaknya memiliki kesamaan ideologi dengan organisasi agama Hindu terkemuka di India yaitu *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS). Selain bercita-cita ingin mendirikan negara berlandaskan agama Hindu, RSS dan afiliasinya tidak segan untuk melakukan tindak kekerasan dalam mencapai tujuannya. Organisasi ini telah beberapa kali dinyatakan terkait dalam kasus-kasus kekerasan seperti pembunuhan Mahatma Gandhi pada tahun 1948 dan beberapa konflik agama yang terjadi di India seperti kerusuhan dan konflik Hindu-Islam di Gujarat pada tahun 1969 serta pengrusakan Mesjid Babri di Ayodhya pada tahun 1992.

RSS telah berdiri sejak tahun 1925, namun baru menjadi perhatian internasional setelah organisasi ini terjun ke dalam arena politik di India pada tahun 1970an. Awalnya, kelompok ini didirikan dengan tujuan untuk membentuk karakter masyarakat India agar sesuai dengan nilai-nilai Hindu dan budaya India, mempersatukan warga India dan membangun rasa nasionalisme dalam mendirikan *Hindu-Rashtra* atau Bangsa Hindu. Namun tujuan ini bergeser sejalan dengan perkembangan organisasi RSS yang semakin besar dan menguasai berbagai bidang di India. Sehingga sebagian besar aktivitas organisasi ini bukan saja ditujukan untuk menyebarkan ideologi yang mereka yakini yaitu untuk mendirikan negara berlandaskan agama Hindu, tetapi juga mulai diarahkan untuk melakukan kampanye dan menyebarkan kebencian terhadap umat Kristen dan Islam.

Meskipun RSS sempat dilarang beroperasi oleh pemerintah Inggris pada masa kolonial dan oleh pemerintah India pasca kemerdekaan negara India, namun organisasi ini mampu bertahan dan terus menunjukkan keberadaan dirinya. Dalam perkembangannya, organisasi ini bahkan berhasil mendirikan puluhan ribu sekolah di India, menguasai sebagian besar bisnis dan perdagangan, mengumpulkan donasi serta menjadi payung bagi beberapa organisasi yang berafiliasi dengannya seperti *Sangh Parivar*, *Vidya Bharati*, *Bajrang Dal*, dan *Vishva Hindu Parishad* (VHP). Saat ini, RSS juga telah berhasil memegang kendali dalam hal politik karena memiliki hubungan yang erat dengan *Bharatiya Janata Party* (BAP), partai

pendukung PM India Narendra Modi yang kini sedang menjabat. Dengan demikian, dapat dikatakan pengaruh politik RSS semakin kuat di India, dan itu juga berarti ancaman bagi umat Kristen dan umat Islam di India akan semakin besar. (<http://www.hudson.org>)

Meskipun radikalisme agama Hindu semakin kuat di India bersamaan dengan menguatnya pengaruh partai politik BAP, namun pengaruh radikalisme tersebut tidak meluas secara internasional dan tidak mendorong munculnya radikalisme Hindu di negara tetangga India seperti di Sri Lanka, Myanmar dan Pakistan. Jumlah penganut agama Hindu yang tidak terlalu signifikan di negara lain tampaknya menjadi salah satu alasan mengapa radikalisme agama Hindu tidak meluas ke negara-negara lain di dunia. Namun demikian, belakangan ini ada kekhawatiran muncul gerakan radikalisme Hindu di Bali, mengingat penganut agama Hindu merupakan kelompok mayoritas di Propinsi Bali, Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan adanya penolakan kelompok masyarakat Hindu di Bali terhadap keinginan sejumlah pihak untuk menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata yang syariah.

### ***3. Radikalisme dalam Agama Buddha***

Agama Buddha seringkali dianggap sebagai agama yang paling sedikit kaitannya dengan kekerasan karena agama ini selalu mengajarkan tentang 'Ahimsa' yang artinya tidak melukai makhluk apapun yang ada di dunia ini. (Jerryson & Juergensmeyer, 2010) Namun, bukan berarti tidak ada kekerasan yang mengatasnamakan agama Buddha atau terinspirasi oleh ajaran-ajarannya. Tercatat ada beberapa kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama Buddha atau menggunakan ajaran agamanya sebagai justifikasi untuk melakukan kekerasan. Seperti misalnya sejumlah Rahib Buddha di Thailand yang melakukan kekerasan terhadap umat Islam Malaysia yang tinggal di Thailand Selatan. Tercatat 6.500 warga Muslim meninggal dunia sejak tahun 2004 akibat kekerasan yang dilakukan oleh para rahib tersebut. Para rahib di Thailand ini terinspirasi melakukan hal tersebut dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh para rahib di negara tetangga mereka, Myanmar, terhadap para pengungsi Rohingya. (<http://www.asianews.it>)

Kekerasan yang dilakukan oleh para rahib di Thailand terhadap warga Muslim di Patani, Thailand Selatan tidak lepas dari motivasi agama sekaligus juga politik. Lebih dari 90% penduduk Thailand beragama Buddha, namun 85% penduduk di wilayah Patani, Thailand Selatan berkebangsaan Melayu dan beragama Islam. Selama bertahun-tahun umat Islam Melayu di daerah ini berupaya untuk mendapatkan kemerdekaan dari Thailand serta beberapa kali mencoba untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat, terutama ketika situasi politik di negara ini tengah memanas akibat kudeta. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Thailand menerapkan Undang-undang Darurat sejak tahun 2004. Hal ini dilakukan untuk menghentikan kelompok umat Islam yang tergabung dalam Pattani United Liberation Organization (PULO) dan Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang terus berupaya memperjuangkan hak otonomi daerah ini. (<http://www.lionsroar.com>)

Namun, bersamaan dengan diberlakukannya UU tersebut, konflik umat Buddha dan Muslim di negara ini juga terus meningkat. dan warga Muslim dipenuhi dengan ketakutan akan adanya ancaman dari kelompok Nasionalis Buddha, yang sebagian besar berasal dari para rahib. Hal ini antara lain disebabkan karena pemerintah Thailand melakukan tindakan *counter-insurgency* secara brutal terhadap umat Islam di wilayah Patani. Pemerintah pusat juga mengerahkan tentara untuk menjaga tempat-tempat ibadah umat Buddha bahkan memberikan izin untuk membentuk pasukan tentara yang berasal dari para rahib. Pasukan yang dinamakan *Tahanpra* ini menjalani kehidupan seperti para rahib umumnya, namun dilatih seperti tentara dan menerima gaji dari pemerintah sebagai tentara. Tahanpra ini dibentuk dengan tujuan untuk melindungi agama Buddha dan menjaga pola hidup masyarakat Thailand agar selaras dengan ajaran dan nilai agama Buddha, terutama untuk warga Buddha di Thailand Selatan. (<http://www.lionsroar.com>)

Kekerasan atas nama agama Buddha juga terjadi di negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Myanmar. Negara dengan populasi sekitar 50 juta orang ini, memiliki 95% penduduk beragama Buddha yang berasal dari etnis Burma, Shan, Karen, dan Rakhine, sedangkan sisanya beragama Kristen, Hindu dan Islam yang berasal dari suku Rohingya serta warga keturunan Cina dan India. Konflik agama antara umat Buddha dan non-Buddha bersumber dari sejarah sebelum negara ini merdeka pada

tahun 1948. Ketika Perang Dunia II berlangsung, sejumlah warga Rohingya yang beragama Islam mendukung pemerintah Inggris untuk memegang kekuasaan di wilayah ini, sementara warga Burma yang beragama Buddha mendukung pemerintahan Jepang. Akibatnya, ketika akhirnya negara ini menjadi negara merdeka, masyarakat kelompok Burma yang merupakan kelompok mayoritas penduduk di Myanmar menolak warga Rohingya untuk tinggal di Myanmar.

Kebencian terhadap warga Rohingya terus memuncak hingga seorang rahib Buddha sekaligus juga pemimpin kelompok nasionalis bernama Ashin Wirathu, melakukan kampanye untuk menyebarkan kebencian terhadap kelompok masyarakat Rohingya dan umat Islam di Myanmar. Wirathu yang juga dikenal sebagai “Burmese Bin Laden,” menjadi populer ketika pada tahun 2001 ia bergabung dan menjadi pemimpin kelompok nasionalis yang anti Muslim dan bahkan kerap dikategorikan sebagai ekstrimis. Kelompok ini dinamakan kelompok 969. Kelompok 969 ini sangat menentang pertambahan jumlah umat Islam di Myanmar dan menyebarkan propaganda kebencian terhadap umat Islam dengan mengatakan bahwa umat Islam hendak mendirikan negara Islam di Rakhine. (<http://www.bbc.com>)

Kekerasan terhadap umat Islam semakin menjadi ketika pada bulan Juni 2012, setelah ada seorang perempuan beragama Buddha diperkosa, Wirathu memimpin sejumlah besar rahib dari kelompok 969 dan warga Arakan-Buddha untuk melakukan penyerangan terhadap warga Rohingya dan Kaman-Muslim di wilayah Arakan, Rakhine utara. Akibatnya, puluhan orang meninggal dan lebih dari 125.000 warga Rohingya dan umat Islam lainnya diusir dari tempat tinggal mereka. Kelompok Wirathu ini juga bahkan melakukan boikot terhadap toko-toko warga Muslim dan melarang umat Buddha melakukan bisnis dengan umat Islam. Dalam sebuah rekaman yang disebarluaskan melalui youtube, Wirathu mengharuskan warga Buddha di Myanmar untuk membeli barang-barang hanya di toko yang bertandakan “969.” (<http://america.aljazeera.com>)

Dalam laporannya di tahun 2013, Human Rights Watch menyebutkan bahwa serangan yang dilakukan oleh kelompok radikal Buddha di Myanmar terhadap umat Islam dan tempat tinggal mereka di Arakan merupakan tindakan yang terorganisir yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar, tokoh masyarakat dan para rahib Buddha.

Hal ini bahkan didukung juga oleh aparat keamanan setempat ketika aparat tidak memberikan pertolongan dan perlindungan kepada warga Rohingya yang terancam bahkan membiarkan dan tampak sangat berpihak terhadap umat Buddha. Pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan Thein Sein saat itu bahkan tidak melakukan tindakan hukum secara serius terhadap para rahib yang melakukan penyerangan kepada warga Muslim di Arakan, Rakhine. (<https://www.hrw.org>)

Akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh para rahib di Myanmar, banyak rahib di negara lain yang menolak untuk dikaitkan dengan aksi radikalisme Buddha di Myanmar. Seperti misalnya di Indonesia, Ketua Perwakilan Umat Buddha di Indonesia (Walubi) Arief Harsono bahkan menekankan bahwa ajaran Buddha di Indonesia berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh Rahib Ashin Wirathu di Myanmar. Hal ini disampaikan oleh pemimpin Walubi ini untuk mencegah munculnya radikalisme agama Buddha di Indonesia dan menghindari terjadinya konflik antar agama atau tindakan balas dendam dari kelompok agama lain, khususnya Islam terhadap umat Buddha di Indonesia. (<http://news.liputan6.com>)

#### ***4. Radikalisme dalam Agama Kristen***

Berdasarkan data dari *Pew Research Center* pada tahun 2010 ketika jumlah penduduk dunia mencapai 6,9 milyar orang, 31,5% di antaranya atau sekitar 2,2 milyar orang beragama Kristen dengan komposisi 50% Katolik, 37% Protestan, 12% Ortodoks dan 1% agama Kristen dengan aliran-aliran lainnya. Sedangkan jumlah orang yang memeluk agama Islam menempati posisi kedua dengan 23% atau sekitar 1,6 milyar orang dengan komposisi 87-90% menganut aliran Sunni dan 10-13% lainnya menganut aliran Syiah. Setelah itu, secara berturut-turut pemeluk agama Hindu, Buddha dan agama-agama lainnya menempati urutan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dari penelitian yang sama, dapat diketahui pemeluk agama Kristen paling banyak tinggal di negara-negara Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika Selatan, Australia dan New Zealand, dan sejumlah kecil di negara-negara di Asia seperti Philipina, India, Korea Selatan, Singapura dan Indonesia. (<http://www.worldometers.info>)

Terkait dengan komposisi pemeluk agama-agama di dunia, Mark Juergensmeyer dalam bukunya *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State* (1993) dan *The Oxford Handbook of Religion and Violence* (2013) menyebutkan tentang potensi meningkatnya kebangkitan nasionalisme agama dan globalisasi setelah berakhirnya Perang Dingin sebagai akibat dari kegagalan model nasionalisme Barat. Juergensmeyer mencatat, bukan saja kelompok teroris berlandaskan agama Islam yang mewarnai dinamika politik internasional, tetapi juga kelompok radikal dan teroris Kristen bermunculan, terutama di negara-negara yang pemerintahannya sekuler seperti Amerika Serikat dan di Afrika Selatan. (Juergensmeyer, 2013) Kemunculan kelompok-kelompok garis keras dan radikal yang menggunakan agama Kristen sebagai basis kerjanya umumnya dimotivasi oleh keinginan untuk membangun (kembali) masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani yang dapat menguasai dunia ini dan segala isinya sambil mempersiapkan kedatangan Mesias untuk kedua kalinya. Dalam upaya mereka mencapai tujuan tersebut, mereka juga kerap menggunakan kekerasan. (Juergensmeyer, 2003)

Dasar pemikiran dan cara inilah yang digunakan oleh kelompok teroris *Army of God* di Amerika Serikat (AS) dalam menentang aborsi di Amerika Serikat. Menurut Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, kelompok teroris ini dibentuk pada tahun 1982 dan hingga kini masih aktif melakukan berbagai tindakan kriminal dan terorisme seperti penculikan, upaya pembunuhan dan pembunuhan, hingga peledakan bom. Sejak tahun 1982-1998, tercatat kelompok ini telah melakukan 24 kali serangan, terutama terhadap klinik-klinik aborsi dan dokter-dokter yang melakukan tindak aborsi. (<http://www.start.umd.edu>)

Kelompok ekstrimis Kristen Protestan lainnya yang masih aktif melakukan kegiatan mereka di Amerika Serikat adalah Ku Klux Klan. Kelompok ini pertama kali berdiri pada akhir tahun 1860an di wilayah Selatan Amerika Serikat. Namun karena kelompok ini kerap menggunakan kekerasan dalam menjalankan aksi untuk mencapai tujuan mereka, kelompok ini akhirnya dilarang beroperasi oleh hukum federal yang berlaku pada saat itu. Namun kelompok ini didirikan kembali pada tahun 1915 dan berkembang pesat serta menyebar hingga hampir ke seluruh wilayah negara AS pada pertengahan tahun 1920an, terutama di daerah-daerah urban.

Kelompok yang berlandaskan pada agama Kristen Protestan ini kerap melakukan kekerasan terhadap para imigran yang beragama Katolik dan Yahudi serta tempat-tempat ibadah mereka. (Pegram, 2011) Pada tahun 1950an, sejumlah kelompok kecil yang bersifat lokal dan tidak berhubungan satu sama lain, melakukan aksi mereka dengan menyebut diri mereka sebagai bagian dari Ku Klux Klan. Kelompok-kelompok ini menentang gerakan hak-hak sipil, dan kerap menggunakan kekerasan hingga membunuh para aktivis pendukung gerakan tersebut. Hingga tahun 2016, diperkirakan jumlah anggota mereka mencapai 6000 orang. (<http://bigstory.ap.org>)

Beberapa aksi kekerasan yang pernah dilakukan oleh Ku Klux Klan adalah: (1) serangan bom pada malam natal tahun 1951 di sekretariat *National Association for the Advancement of Colored People* (NAACP) yang menyebabkan sedikitnya 2 orang meninggal dunia; (2) pembunuhan Willie Edwards Jr., seorang staf Afro-Amerika yang bekerja di NAACP, pada tahun 1957; (3) pembunuhan pengurus NAACP Medgar Evers di Mississippi pada tahun 1963; (4) serangan bom di Gereja Baptis di Birmingham, Alabama, pada tahun 1963 dan menewaskan 4 orang perempuan Afro-Amerika; (5) pembunuhan terhadap tiga orang aktivis HAM yaitu Chaney, Goodman dan Schwerner di Mississippi pada tahun 1964; (6) masih pada tahun yang sama kelompok ini juga membunuh 2 anak remaja berkulit hitam, Henry Hesekeh Dee dan Charles Eddie Moore di Mississippi; (7) tahun 1965 melakukan pembunuhan terhadap Viola Liuzzo di Alabama; (8) pembunuhan terhadap pemimpin NAACP, Vernon Dahmer; (9) ledakan bom di rumah seorang pengerja gereja Methodis, sejumlah sinagog (tempat ibadah orang Yahudi) dan rumah seorang Rabbi di Jackson, Mississippi, dan sebuah bom lainnya di Meridien; (10) pada tahun 1971, anggota KKK meledakan bom di 10 bus sekolah di Pontiac, Michigan; (11) tahun 1979, lima orang aktivis dari Serikat Pekerja Komunis dibunuh oleh anggota KKK, di Greensboro, Carolina Utara; (12) membunuh seorang pria berkulit hitam, Michael Donald, di Alabama.

Seluruh pelaku kekerasan yang merupakan anggota KKK akhirnya diproses hukum, sebagian besar ditangkap dan dihukum penjara, bahkan ada pula yang dihukum mati dengan kursi listrik pada tahun 1997. Hal ini menunjukkan ketegasan dan keseriusan pemerintah Amerika Serikat dalam menindak para pelaku kekerasan

dari anggota kelompok radikal Ku Klux Klan, meskipun kelompok ini kerap mengatasnamakan agama dalam seluruh aktivitas dan tindakannya. Namun demikian, tampaknya pemerintah AS masih tetap harus bekerja keras dalam mencegah dan menghentikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini. Hal ini disebabkan karena pada kenyataan jumlah cabang KKK di seluruh wilayah AS telah meningkat dari 72 menjadi 190 pada tahun 2015. (<http://www.adl.org>) Bahkan kelompok ini memiliki cabang organisasinya di sejumlah universitas di Amerika Serikat, seperti Vanderbilt University, the University of Georgia, the University of Mississippi, the University of Akron dan the University of Southern California.

Di Kongo, Afrika Tengah dan Uganda sebelah Utara terdapat juga kelompok radikal yang menggunakan ajaran-ajaran Kristen sebagai landasan mereka dalam beraktivitas. Kelompok ini disebut dengan Lord's Resistance Army (LRA) atau disebut juga Gerakan Lord's Resistance dengan pendirinya Joseph Kony yang menganggap dirinya sebagai seorang Nabi yang diutus Tuhan. Awalnya kelompok ini dikenal dengan sebutan the United Holy Salvation Army atau Uganda Christian Movement yang bertujuan untuk mendirikan negara Uganda yang berlandaskan pada Sepuluh Perintah Allah dalam Kitab Perjanjian Lama di Alkitab.

LRA mulai beroperasi sejak tahun 1986 dengan tujuan menggulingkan pemerintah Uganda dan menggantikannya dengan pemerintahan Kristen. Sepanjang tahun 1986-2006, tercatat hampir 2 juta orang kehilangan tempat tinggal dan mengungsi dari Uganda utara, 66.000 anak-anak dan remaja hilang dan diculik oleh LRA untuk dijadikan sebagai tentara atau pemuas nafsu sex para tentara LRA. Dalam melakukan aksinya, kelompok ini tidak segan untuk membunuh atau membakar orang-orang yang lemah dan sudah tua, memotong telinga, bibir atau bahkan hidung sebagai bentuk peringatan bagi yang lainnya. Itu sebabnya, beberapa negara menganggap kelompok ini sebagai pemberontak. Namun ada juga negara seperti Amerika Serikat yang mengkategorikan kelompok ini sebagai kelompok teroris karena LRA dianggap bukan hanya bermaksud untuk menggulingkan pemerintah Uganda yang sah dan menyerang tentara atau aparat pemerintahan, tetapi juga menyerang warga sipil serta menimbulkan ketakutan dalam lingkup yang lebih luas. (<http://www.state.gov>)



Kelompok radikal Kristen lainnya juga muncul di India yaitu kelompok *National Liberation Front of Tripura* (NLFT). Pemerintah India bahkan mengkategorikan kelompok NLFT ini sebagai kelompok teroris pada tahun 1997. Pemerintah India menggunakan UU Pencegahan Tindakan melawan Hukum 1967 dan kemudian UU Pencegahan Terorisme tahun 2002 untuk menyatakan kelompok ini sebagai kelompok teroris, di samping karena kelompok ini berusaha untuk memisahkan diri dari India dan membentuk negara Tripuri yang mereka gambarkan sebagai Kerajaan Allah dan Yesus Kristus di Tripuri, dengan menggunakan cara-cara kekerasan. (<http://www.satp.org>)

Kelompok NLFT didirikan oleh Dhananjoy Reang pada tahun 1989 dengan dukungan penuh dari Gereja Baptis Tripura yang didirikan oleh para misionaris dari New Zealand pada tahun 1940an. Gereja ini bukan saja mendukung secara finansial dan ideologi, tetapi juga mendukung dalam hal persenjataan dan amunisi bagi anggota NLFT dalam melakukan “perang suci” menurut pandangan mereka. Dalam menjalankan operasinya dan untuk mencapai tujuannya, kelompok ini kerap memaksa penduduk lokal yang tinggal di wilayah Tripura untuk memeluk agama Kristen, dan tidak segan memperkosa bahkan membunuh mereka yang menolak berpindah agama. Mereka juga melarang praktek-praktek agama Hindu dilakukan di wilayah ini serta membunuh para pemimpin agama Hindu setempat. (<http://www.stephen-knapp.com>)

Beberapa aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok NLFT adalah: (1) April 2000, pemerintah India menahan sekretaris dari Gereja Baptis Tripura yang membawa sejumlah bahan peledak, yang diakuinya sebagai alat untuk menjalankan operasi kelompok NLFT; (2) pada tahun 2000, NLFT mengancam akan membunuh umat Hindu yang merayakan Festival Durga Puja di wilayah Tripura; (3) sepanjang tahun 1992-2003, lebih dari 600 umat Hindu yang dibunuh, beberapa di antaranya para pemimpin agama Hindu yang diculik dan kemudian ditemukan telah meninggal, karena mereka menolak untuk berpindah agama menjadi Kristen; (4) pada tahun 2001 dilaporkan ada 826 serangan terorisme di Tripura, di mana 405 orang di antaranya meninggal, dan 481 diculik, yang dilakukan oleh NLFT dan organisasi

Kristen lainnya yang terkait seperti Christian All Tripura Tiger Force (ATTP). (<http://www.stephen-knapp.com>)

Banyaknya jumlah kelompok radikal non-Islam di berbagai negara di dunia dan aksi kekerasan yang mereka lakukan membuktikan bahwa radikalisme dalam agama bukan hanya milik agama Islam. Setiap agama berpotensi untuk dijadikan sebagai pijakan bagi para pemeluknya dalam melakukan kekerasan. Dalam hal ini, ayat-ayat agama kerap dijadikan sebagai referensi bagi pembenaran penggunaan kekerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk membela agama dan menegakkan ajaran agamanya atau bahkan dengan tujuan yang lebih politis yaitu untuk mendirikan negara dengan menggunakan agama versi mereka sebagai landasannya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan pula bahwa umumnya kelompok radikal agama tertentu muncul di negara di mana agama tersebut memiliki penganut dengan jumlah mayoritas. Lebih lanjut, radikalisme atas nama agama tersebut termanifestasi ketika mereka berinteraksi dengan kelompok masyarakat agama-agama lainnya yang berjumlah yang jauh lebih sedikit atau kelompok pendatang yang memiliki agama berbeda dengan agama kelompok masyarakat mayoritas.

### **Radikalisme Non-Islam di Indonesia**

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang kelompok radikal non-Islam yang ada di Indonesia, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang sejak awal dibangun oleh semangat nasionalisme/kebangsaan untuk mengusir penjajah dari tanah Indonesia tanpa memandang suku, agama dan ras. Itu sebabnya, negara ini menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi Bangsa, dan bukan atas dasar agama tertentu. Meski demikian, konstitusi negara ini memberi pengakuan bahwa negara Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Ketuhanan yang Maha Esa serta memberi kesempatan bagi para pemeluk agama yang diakui untuk menjalankan ibadah dan praktek-praktek keagamaan mereka menurut aturan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2, UUD 1945.

Namun dalam kenyataannya, ada beberapa pihak yang dengan sengaja ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi agama tertentu, seperti misalnya gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Gerakan ini pada tahun 1949,

dengan pemimpinnya Kartosuwiryo, berniat untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) karena Kartosuwiryo dan pengikutnya kecewa serta menganggap negara Indonesia yang didirikan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 tidak sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Meskipun akhirnya Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1960an, keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ideologi agama Islam tidak berakhir sepenuhnya. Sejumlah kelompok radikal yang menggunakan agama Islam sebagai basis operasi mereka kemudian dibentuk dengan tujuan yang hampir sama seperti DI/TII, di antaranya yaitu menegakkan syariah dan ajaran Islam di Indonesia, membentuk negara Islam dan mengubah dasar negara Indonesia dari Pancasila menjadi Syariat Islam. Pembentukan kelompok-kelompok radikal atas dasar agama Islam ini menjadi semakin banyak ketika pada akhir tahun 1990, Indonesia mengalami reformasi politik yang mendorong kebebasan rakyat Indonesia untuk berserikat dan membentuk organisasi.

Keinginan mendirikan negara Islam di Indonesia menjadi sesuatu yang logis karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2010, dari sekitar 240 juta penduduk Indonesia, 87% di antaranya beragama Islam, 7% beragama Kristen, 3% beragama Katolik, 1,7% beragama Hindu, 0,7% beragama Buddha, dan sisanya beragama Konghucu serta agama-agama lokal. Jika melihat pada pola di beberapa negara, bahwa kelompok radikal yang berlandaskan agama tertentu tumbuh subur di negara-negara di mana agama tersebut menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduknya, maka tidak mengherankan jika di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam bermunculan kelompok-kelompok radikal Islam yang menginginkan terjadinya perubahan mendasar di negara ini, terutama dalam hal ideologi dan dasar negara.

Namun, itu bukan berarti, kelompok radikal dari latar belakang agama yang lain tidak ada di negara ini. Kelompok radikal dari agama lain bisa saja tumbuh meskipun bukan dengan tujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ajaran agamanya seperti halnya yang dilakukan oleh DI/TII atau Jemaah Islamiyah di Indonesia. Kelompok radikal non-Muslim yang muncul di Indonesia umumnya dibentuk untuk merespons aksi kekerasan dan militansi dari kelompok radikal

lainnya. Kelompok radikal Kristen di Poso dan Ambon misalnya muncul sebagai reaksi terhadap kelompok militan Islam ketika terjadi konflik horizontal pada akhir tahun 1990an dan awal tahun 2000an di wilayah Poso dan Ambon. Atas nama melindungi umat Kristen dan melakukan tindakan balas dendam, kelompok-kelompok ini melakukan aksi kekerasan terhadap umat Islam. Belakangan ada juga berita yang menyebutkan bahwa gereja di Papua mendukung gerakan radikal yang dilakukan oleh warga Kristen terhadap warga non-Kristen yang kebanyakan merupakan pendatang di wilayah Papua, seperti yang terjadi pada kasus Tolikara pertengahan tahun 2015 yang lalu. Gereja-gereja semacam ini belakangan juga mulai bertambah banyak di Indonesia seiring dengan masuknya misionaris dari berbagai negara yang mengajarkan tentang fundamentalisme dalam Kekristenan.

Untuk memahami radikalisme kelompok Non-Islam di Indonesia, khususnya dari kelompok Kristen, di bawah ini akan dijelaskan tentang kelompok-kelompok tersebut, apa tujuan mereka dan bagaimana cara kerja mereka.

#### **1. Pasukan Kelelawar Hitam atau Pasukan Merah**

Kelompok ini dinamakan Pasukan Kelelawar Hitam atau Pasukan Merah karena mereka menggunakan pakaian hitam, kalung salib dan ikat kepala merah dalam menjalankan aksinya. Kelompok ini muncul di Poso dan mulai melakukan serangannya pada pertengahan tahun 2000 dengan pemimpinnya Ir. Advent Lindo Lateka. Sebelumnya, Lateka adalah seorang pejabat pemerintahan di Departemen Pertanian yang kemudian mengundurkan diri karena merasa terpanggil untuk memperjuangkan keadilan bersama-sama dengan umat Kristen lainnya di Poso. Menurutnya, umat Kristen di Poso telah mengalami ketidakadilan dan menjadi korban dalam berbagai kerusuhan yang terjadi di Poso. Selain Lateka, ada juga beberapa pendukung dari kelompok ini seperti Fabianus Tibo, Marinus Riwu, dan Dominggus Da Silva di mana ketiganya dihukum mati oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2006 dengan tuduhan menjadi dalang dalam kerusuhan di Poso. Lateka sendiri tewas terbunuh dalam kerusuhan yang terjadi pada tanggal 2 Juni 2000.

Dalam suratnya yang dibacakan oleh Pendeta Rinaldy Damanik di depan Kapolres Poso setelah kematiannya, Lateka menyebutkan bahwa kelompok Pasukan Kelelawar Hitam ini dibentuk dengan 3 tujuan utama yaitu: (1) memperjuangkan pemulihan hak asasi masyarakat Poso yang telah diacak-acak dan direncanakan dengan baik oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu; (2) membebaskan rakyat Poso dari tekanan orang-orang yang menjadi dalang dan pelaku dalam kerusuhan dan (3) menahan orang-orang yang menjadi pelaku dalam kerusuhan dan dilindungi oleh pemerintah. (Damanik, 2003)

Dalam surat yang sama, disebutkan juga 7 (tujuh) tuntutan Lateka seperti: (1) membersihkan Poso dari para pelaku kerusuhan yang telah diidentifikasi oleh polisi; (2) sebagai penduduk lokal, warga Poso seharusnya diberikan kesempatan untuk hidup mandiri di kampung halaman mereka sendiri; (3) karena desa Lambogia, Kasintuwu yang merupakan kampung orang Kristen dan beberapa gereja telah dibakar dan dihancurkan oleh pelaku-pelaku dari kelompok Muslim, maka kami pun akan melakukan hal yang sama terhadap kampung-kampung para pelaku tersebut seperti Moengko, Kayamanya, Bone Sompe and Lawanga yang merupakan kantong umat Islam di Poso; (4) polisi harus berhenti berpihak hanya pada satu kelompok saja karena dalam hal ini polisi selalu berusaha menghentikan tindakan kelompok Kristen namun membiarkan para pelaku dari kelompok Islam untuk membakar rumah-rumah dan gedung-gedung milik orang Kristen; (5) berikan kesempatan dan kebebasan kepada kami untuk menolong pemerintah dalam menangkap para pelaku kerusuhan dan melakukan beberapa tindakan sebagai bagian dari keamanan nasional; (6) sangat disayangkan bahwa aparat keamanan tidak dapat menangani kekejaman para pelaku kerusuhan dan membiarkan mereka menjarah serta membakar rumah-rumah warga dan gereja; (7) kami membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam mencapai maksud dari perjuangan ini.

Dari isi surat tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kelompok militan Kristen yang didirikan oleh Lateka ini lebih ditujukan untuk melindungi warga Kristen dari serangan kelompok Islam pada waktu kerusuhan Poso serta melakukan tindakan balas dendam kepada warga Islam lainnya. Kelompok ini tidak

bertujuan untuk mengganti ideologi negara Indonesia dengan ajaran agamanya dan mereka juga tidak memaksa orang lain untuk berpindah agama menjadi Kristen. Namun tindakan balas dendam terhadap kelompok agama lain dengan menggunakan kekerasan, mulai dari membakar rumah warga dan mesjid hingga membunuh warga non-Kristen di Poso, membuat kelompok ini dianggap sebagai kelompok teroris Kristen di kalangan sejumlah umat Islam. Namun, sejalan dengan berakhirnya konflik di Poso, kelompok inipun tidak lagi melakukan aktivitasnya dan tidak jelas keberadaannya saat ini.

## 2. **Laskar Kristus**

Ketika terjadi konflik di Ambon pada akhir Desember 1998, sejumlah pemuda Kristen yang berasal dari daerah Kudamati mendatangi daerah konflik dengan tujuan membantu warga Kristen yang menjadi korban kerusuhan di daerah Batumerah. Namun dalam perjalanan menuju Batumerah untuk membantu saudara dan teman mereka yang beragama Kristen, kelompok pemuda ini melewati perkampungan warga Muslim dan melakukan kekerasan di sana. Mereka merusak sejumlah motor dan rumah warga Muslim, sambil menyanyikan lagu gereja yang berjudul “Laskar Kristus Maju.” Itulah sebabnya kelompok ini kemudian dinamakan Laskar Kristus. (Damayanti, 2011)

Para pemuda ini merupakan anggota dari sebuah gereja di Kudamati, dengan pemimpinnya seorang pendeta bernama Agus Wattimena. Menurut pengakuan Wattimena, gereja mereka memiliki 60.000 pengikut yang siap menjadi Laskar Kristus dan bersedia membantu saudara-saudara mereka yang menjadi korban dalam kerusuhan di Ambon serta melakukan tindakan yang perlu untuk membalaskan dendam mereka kepada warga Muslim. Sebagian besar dari anggota Laskar Kristus ini adalah anak-anak remaja yang belum berusia 17 tahun namun diijinkan oleh orangtua mereka untuk bergabung dalam kelompok tersebut. Sebagai seorang pemimpin umat, mudah saja bagi Wattimena untuk mendapatkan simpati dan dukungan untuk melakukan aksinya. dari umat Kristen baik itu anggota gerejanya maupun Kristen lainnya di Ambon

Ia kerap menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk memperoleh dukungan dari warga Kristen, mulai dari rekrutmen anggota hingga penyediaan logistik.

Di samping warga gereja, dalam melakukan aksinya Pendeta Wattimena mendapat dukungan dari kelompok Front Kedaulatan Maluku (FKM). Kelompok ini diduga memiliki kaitan dengan organisasi Republik Maluku Selatan (RMS) yang pada masa Orde Lama sempat dicap sebagai gerakan separatis (<http://www.oocities.org>) FKM didirikan oleh Alex Manuputty pada tanggal 15 Juni 2000, di mana Pdt. Wattimena duduk menjadi salah satu pengurusnya. Manuputty memanfaatkan konflik yang terjadi di Ambon sebagai momentum untuk menyatakan kembali keinginan rakyat Maluku untuk merdeka. Dalam *press release* tentang Deklarasi Kemerdekaan Maluku yang disampaikan pada tanggal 18 Desember 2000, Alex Manuputty menegaskan agar pemerintah Indonesia menghargai keputusan warga Maluku yang ingin merdeka dan membentuk negara sendiri. Menurutnya, apa yang terjadi dalam konflik di Ambon, merupakan rekayasa pemerintah dan kelompok Islam untuk menguasai wilayah mereka. (<http://www.michr.net>)

Dua hari setelah deklarasi FKM secara terbuka, Pendeta Wattimena ditemukan tewas di depan rumahnya akibat peluru yang ditembakkan di kepalanya. Tidak jelas siapa pelaku penembakan tersebut, namun sejumlah pihak menyatakan bahwa Wattimena dibunuh karena terkait dengan pernyataan kemerdekaan Rakyat Maluku pada tanggal 18 Desember 2000. Dari penjelasan ini, tampaknya kelompok radikal Kristen yang ada di Maluku tidak dapat dipisahkan dari sejarah separatisme RMS dan upaya untuk memerdekakan diri dari pemerintah Indonesia yang sah. Dengan kata lain, kelompok FKM memanfaatkan konflik yang ada di Ambon untuk mendirikan kembali negara yang pernah diperjuangkan oleh Republik Maluku Selatan. Oleh karena itu, meskipun konflik di Ambon telah berakhir dan kelompok Laskar Kristus tidak lagi beroperasi, namun potensi radikalisme yang didasari oleh semangat separatisme masih sangat mungkin terjadi di wilayah ini.

### 3. **Brigade Manguni**

Brigade Manguni (BM) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk di Manado, Sulawesi Utara pada tahun 1999. Awalnya BM dibentuk untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Sulawesi Utara ketika terjadi kerusuhan di Poso dan di Ambon. Kelompok ini bertujuan untuk mencegah agar konflik antar agama di Poso tidak meluas hingga ke Manado serta mencegah terjadinya konflik di wilayah mereka. Namun dalam perkembangannya, BM kemudian membantu kelompok masyarakat Kristen di Poso dan Ambon pada saat konflik berlangsung. Bantuan yang diberikan umumnya adalah memberikan persediaan logistik seperti makanan dan obat-obatan, membantu proses evakuasi warga Kristen ke daerah-daerah sekitar yang lebih aman, serta memediasi kepentingan kelompok Kristen dengan aparat keamanan dan pemerintah. (Damayanti, 2011)

Para penggagas berdirinya BM antara lain adalah Decky Maengkom yang kemudian menjabat sebagai ketua BM, Renata Ticonuwu yang juga menjabat sebagai sekretaris umum, Mayal Rorimpandei, Onal Meseleman, Max Togas, dr. Brando Lengkey, Robby Sangor, dr. Lumingkewas dan Matulandi Supit. Bersamaan dengan deklarasi pembentukannya, organisasi ini juga melakukan rekrutmen anggota. Pada saat deklarasi berlangsung, organisasi ini langsung berhasil merekrut kurang lebih 6000 anggota. Dari para anggotanya inilah, organisasi ini berhasil menghimpun dana yang membuat organisasi ini kemudian dapat beroperasi hingga hari ini.

Tujuan dari organisasi ini bukan hanya untuk menjaga keamanan dan stabilitas di Sulawesi Utara, tetapi juga: (1) meningkatkan status dan kualitas hidup masyarakat Minahasa; (2) mendukung dan memelihara kesatuan masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara dan daerah-daerah lainnya yang memiliki kesamaan ideologi; (3) memelihara hukum dan sosial kebudayaan di wilayah Sulawesi Utara; (4) menciptakan masyarakat yang memiliki kualitas yang baik dan profesional dalam berbagai aspek kehidupan; (5) menjaga keberlanjutan sumber daya alam; (6) menjadi media bagi masyarakat dan (7) menegakkan demokrasi.



Pada saat konflik Poso dan Ambon terjadi, Brigade Manguni menggunakan dua pendekatan untuk menjaga keamanan Manado dari konflik antar agama atau antar etnis yang terjadi di sekitarnya. Yang pertama dengan memanfaatkan budaya Minahasa sebagai alat pemersatu agar warga Manado tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang berkonflik maupun orang-orang yang memanfaatkan konflik tersebut. Yang kedua adalah dengan membuat pos-pos keamanan di tiap desa untuk berjaga-jaga dari berbagai ancaman. Dua pendekatan ini terbukti membuat keadaan di Manado relatif aman dan stabil serta bebas dari konflik. Hal ini jugalah yang membuat banyak warga Kristen Poso dan Ambon yang melarikan diri ke Manado pada saat konflik terjadi.

Saat ini, ketika konflik di Poso dan Ambon telah berakhir, BM tetap melakukan aktivitas mereka terutama dalam menjaga keamanan di wilayah Manado. Dalam melakukan aktivitas tersebut, BM kemudian kerap dianggap sebagai kelompok radikal Kristen oleh kelompok-kelompok dari agama lainnya seperti yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara. Selain menolak kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di wilayah Sulawesi Utara, kelompok ini juga dituding melakukan kekerasan terhadap tempat ibadah dan umat Islam yang hendak mendirikan mesjid seperti Masjid Asy-Syuhada di Kompleks Aer Ujang, kelurahan Girian Permai, di daerah Bitung. Kelompok ini bahkan merusak mesjid dan rumah sejumlah tokoh agama serta warga yang beragama Islam. (<http://nasional.republika.co.id>) Hal ini tentu saja menambah panjang daftar kasus intoleransi beragama di Indonesia.

#### **4. Gereja-gereja Fundamentalis dan Evangelistik**

Pertengahan Juli tahun 2015 lalu, terjadi kerusuhan antara umat Kristen dan umat Islam di Tolikara Papua, yang melibatkan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Papua. Keterlibatan tersebut dikaitkan dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja GIDI Wilayah Toli yang melarang umat Islam merayakan Idul Fitri di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, tepat pada hari raya Idul Fitri, 17 Juli 2015. Kemarahan dan serangan warga gereja terhadap umat Muslim yang sedang beribadah Sholat Ied dan merayakan Idul Fitri ini dituding

telah menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketakutan warga setempat. Akibat serangan tersebut, 1 orang meninggal, 11 orang luka-luka, sejumlah bangunan rusak dan hangus terbakar, termasuk sebuah mesjid. (<http://www.cnnindonesia.com>)

Gereja Injili di Indonesia (GIDI) adalah salah satu denominasi dari gereja-gereja Kristen yang ada di Indonesia. Gereja ini mulai berdiri di Papua sejak tanggal 12 Februari 1962 setelah sebelumnya sejumlah misionaris dari Australia datang ke daerah Sentani, Papua pada tahun 1950an. GIDI bukan saja aktif di bidang pelayanan kerohanian umat Kristen, tetapi juga melayani masyarakat setempat di bidang kesehatan dan pendidikan dengan mendirikan rumah sakit, klinik dan sekolah-sekolah mulai dari PAUD hingga, SMP, SMK dan Sekolah Theologia. Setelah berkibrah selama kurang lebih setengah abad di Papua, anggota jemaatnya kini tercatat mencapai hampir 1 juta orang yang menyebar di seluruh wilayah Papua. Anggota gereja ini bukan saja berasal dari masyarakat sipil biasa tetapi juga para pejabat pemerintahan, termasuk anggota DPR dan bahkan Gubernur Papua. Itu sebabnya, gereja ini mendapat banyak dukungan dalam berbagai aktivitasnya. (<http://www.pusatgidi.org>)

Gereja Injili di Indonesia di wilayah Tolikara ini juga dituding telah melarang didirikannya gereja lain di wilayah tersebut serta melarang umat Kristen yang ada di Tolikara untuk beribadah di gereja lain yang denominasinya berbeda dengan GIDI. Hal ini menunjukkan bahwa GIDI bukan saja bersikap intoleran dan militan terhadap umat yang berbeda agama, tetapi juga terhadap umat Kristen yang berasal dari gereja dengan denominasi yang berbeda. Namun, satu hal yang perlu dicatat, surat edaran yang melarang umat Islam beribadah pada hari Idul Fitri yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja GIDI di Wilayah Toli pada tanggal 11 Juli 2015 dan melarang umat Kristen beribadah di gereja lain selain GIDI Tolikara dianggap tidak sah oleh Ketua Sinode GIDI Pusat karena dikeluarkan tanpa sepengetahuan dan seijin Pengurus Sinode Pusat GIDI. (<http://regional.kompas.com>) Ini menunjukkan adanya perbedaan sikap antara Sinode GIDI Pusat dengan Badan Pekerja GIDI di Wilayah Tolikara dalam berhubungan dengan umat yang berbeda agama ataupun sesama umat Kristen

namun berbeda denominasi.

Pandangan yang dimiliki oleh GIDI Papua juga dimiliki oleh sejumlah gereja Kristen lainnya di Indonesia yang dianggap fundamental dan mendapatkan pengaruh dari para penginjil dari Amerika Serikat. Sejalan dengan berkembangnya paham Kristen evangelistik yang fundamentalis untuk melawan moderenisme di Amerika Serikat tahun 1950an, sejumlah gereja di Indonesia pun mulai mengikuti trend yang sama pada tahun 1970-an. Berbeda dengan pandangan gereja mainstream yang dibawa oleh para misionaris Jerman dan Belanda ke Indonesia, gereja-gereja fundamentalis yang disemangati oleh paham evangelistik dari Amerika Serikat sangat mengedepankan pentingnya keselamatan dan kesucian hidup menurut versi yang mereka percayai.

Meskipun gereja-gereja aliran fundamentalistik ini tidak melakukan aksi kekerasan, namun semangat penginjilan yang tinggi serta upaya untuk menarik orang-orang di luar agama Kristen untuk memeluk agama Kristen menimbulkan masalah tersendiri. Isu Kristenisasi sangat rentan menimbulkan ketegangan antar umat beragama. Bahkan gereja-gereja ini dengan berbagai upaya menarik orang-orang di luar aliran Kekristenan mereka untuk mengikuti cara mereka serta beribadah di gereja mereka, sehingga muncul istilah “rebutan jemaat” atau “rebutan domba.” Hal ini tentunya menimbulkan ketegangan di antara gereja-gereja itu sendiri. Sayangnya, meskipun gereja-gereja dari berbagai aliran dan denominasi ini diwadahi oleh Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), PGI tidak memiliki kewenangan untuk mengatur atau mengendalikan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh gereja-gereja anggotanya. Bahkan sejumlah gereja fundamentalis tersebut banyak yang menolak untuk bergabung di bawah PGI dan membentuk asosiasi denominasi gereja mereka sendiri. (<http://islamlib.com>)

Dari penjelasan tentang kelompok-kelompok radikal non-Islam di Indonesia, ada beberapa karakteristik yang perlu kita pahami tentang kelompok radikal non-Islam tersebut, yaitu:

1. Ada kelompok radikal Kristen yang terbentuk sebagai reaksi dari adanya gerakan-gerakan radikal Islam di Indonesia yang muncul pada saat konflik

antar agama seperti misalnya Laskar Kristus, Pasukan kelelawar hitam dan kelompok-kelompok militan yang terbentuk pada saat konflik antar agama di Poso dan di Ambon. Kelompok seperti ini biasanya terbentuk secara spontan dan reaktif sebagai akibat adanya serangan dari kelompok agama lain.

2. Ada kelompok radikal Kristen separatis yang memanfaatkan konflik antar agama di Indonesia sebagai pintu masuk untuk operasi dan pergerakan mereka, seperti misalnya gerakan Republik Maluku Selatan. Kelompok ini umumnya sudah terstruktur dan terorganisir, namun baru akan beroperasi ketika terjadi konflik antar agama di Indonesia.
3. Ada kelompok radikal Kristen yang terbentuk di wilayah kantong Kristen dengan tujuan untuk menjaga kemurnian dan keamanan wilayah mereka dari kelompok agama lainnya, seperti Brigade Manguni di Manado.
4. Ada kelompok Kristen yang radikal dalam hal pemikiran dan cara-cara ibadah seperti yang ditunjukkan oleh gereja-gereja fundamentalis dan evangelistik di Indonesia. Meskipun gereja-gereja ini tidak melakukan aksi kekerasan, namun berbagai program misionaris dan upaya Kristenisasi serta seruan mengajak orang-orang Kristen di luar aliran mereka untuk datang beribadah di gereja mereka, sangat berpotensi menimbulkan konflik antar agama dan konflik intra-agama di dalam agama Kristen itu sendiri.

### **Strategi Deradikalisasi Radikalisme Non-Islam**

Penanganan konflik Poso dan Ambon pada awal tahun 2000 dengan menggunakan pendekatan keamanan malah membuat konflik antara kelompok Islam dan Kristen semakin memanas. Dalam beberapa kejadian, aparat keamanan dianggap berpihak terhadap salah satu kelompok dan bersikap keras terhadap kelompok yang lainnya. Keberpihakan polisi dan tentara terhadap pihak-pihak yang sedang berkonflik malah membuat konflik sosial-agama di Poso dan Ambon sulit diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa konflik agama yang timbul sebagai akibat radikalisme agama tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang militeristik. Cara ini malah memicu timbulnya konflik yang lebih besar dan berkepanjangan serta radikalisme agama yang tidak kunjung dapat diakhiri.

Konflik di Poso dan Ambon akibat radikalisme agama, baik kelompok Islam maupun Kristen, berangsur-angsur pulih setelah pemerintah melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk mereka semua bersepakat menjaga keadaan Poso dan Ambon tetap aman dan damai. Dalam hal ini pendekatan keamanan tidak dijadikan sarana penyelesaian yang paling utama, namun juga tidak sepenuhnya ditinggalkan. Dari pengalaman konflik Poso dan Ambon dapat kita katakan bahwa untuk mencegah meluasnya konflik dan mengatasi dampak-dampak yang timbul akibat radikalisme agama, pemerintah menggunakan pendekatan secara sosiologis dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Di samping itu, pemerintah juga tetap menegakkan aturan yang berlaku di mana aparat keamanan seperti polisi dan aparat penegak hukum lainnya tetap berperan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penegakan HAM. Kedua pendekatan ini membuat penyelesaian konflik di Poso dan Ambon relatif lebih efektif.

Untuk memilih strategi yang tepat dalam mengatasi radikalisme non-Islam di Indonesia, khususnya agama Kristen, maka perlu terlebih dahulu dipahami bahwa kekristenan di Indonesia tidaklah seragam dan tidak dapat dikategorikan ke dalam satu kelompok yang sama. Ada banyak denominasi gereja yang dibawa oleh para misionaris Jerman dan Belanda sejak awal mereka masuk ke Indonesia dan terus berkembang hingga saat ini, seperti Presbiterian, Calvinis, Methodis, Anglikan dan gereja-gereja suku seperti Gereja Kristen Jawa dan Huria Kristen Batak Protestan. Belakangan para misionaris Amerika Serikat mulai menyebarkan pengaruh Kekristenan yang fundamentalis dan evangelistik di Indonesia seperti aliran Reform Injili, Pantekosta dan Karismatik. Masing-masing denominasi memiliki aturan, doktrin dan cara-cara penyembahan yang berbeda satu sama lain, yang bahkan kerap menimbulkan perselisihan di antara kelompok Kristen itu sendiri.

Selanjutnya, untuk dapat menyusun strategi deradikalisasi terhadap kelompok radikal Kristen, ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh setiap pemangku kebijakan di Indonesia, yaitu:

1. Kelompok radikal Kristen umumnya terbentuk dan beroperasi di wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong Kristen, seperti Poso, Ambon Manado, dan Papua, di mana jumlah umat Kristen relatif banyak atau

setidaknya melampaui jumlah pemeluk agama lain yang tinggal di daerah tersebut. Pembentukan kelompok-kelompok ini di kantong Kristen tentunya akan membuat dukungan baik finansial, logistik maupun rekrutmen anggota menjadi lebih mudah diperoleh.

2. Meskipun terjadi aksi kekerasan dan radikalisme di wilayah-wilayah Kristen, namun umumnya konflik tersebut hanya terjadi di daerah tersebut dan tidak meluas sampai ke daerah lain. Yang seringkali terjadi justru pihak luar lah yang masuk ke kantong-kantong Kristen dan membuat konflik menjadi semakin besar dan berkepanjangan.
3. Aksi radikalisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal non-Islam umumnya dilakukan bukan dengan tujuan untuk mengganti ideologi negara, namun lebih kepada upaya balas dendam dan menolak hadirnya kelompok lain yang berbeda dengan kelompok mereka seperti halnya yang terjadi di Poso, Manado dan Papua. Namun, pengecualian untuk kelompok radikal yang ada di Ambon. Aksi kekerasan yang mereka lakukan dapat dikaitkan dengan gerakan separatis yang pernah ada di Maluku, Republik Maluku Selatan (RMS), yang masih terus memperjuangkan kedaulatan wilayah Maluku karena kecewa dan menganggap pemerintah Pusat tidak mampu memfasilitasi aspirasi dan kebutuhan warga Kristen yang ada di Ambon.
4. Berkembangnya aliran fundamentalis dan evangelistik dalam gereja-gereja di Indonesia, sangat berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik antar agama sekaligus juga intra agama.

Dengan melihat pada karakteristik-karakteristik tersebut di atas, maka pemerintah perlu melakukan beberapa hal dalam mencegah dan menindak munculnya kelompok radikal Non-Islam yang ada di Indonesia, yaitu:

1. Pemerintah perlu memahami konteks sosial-budaya yang ada di wilayah kantong-kantong Kristen dengan melakukan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kepentingan pemerintah dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari munculnya gerakan-gerakan radikal baik yang menggunakan agama Kristen

sebagai landasannya maupun separatisme.

2. Mengingat kelompok radikal non-Islam kerap muncul ketika terjadi konflik agama di Indonesia maka pemerintah perlu mendorong peranan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) agar lebih aktif dalam menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang kondusif serta menghindari terjadinya kesalahpahaman dan konflik atas nama agama.
3. Penegakkan hukum secara adil dan tidak berpihak perlu dikedepankan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah pusat maupun daerah dan seluruh perangkatnya perlu tegas menindak siapapun yang melakukan kekerasan dan/atau radikalisme atas nama agama tanpa melihat agama mereka.
4. Kementerian Agama bersama-sama dengan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja di Indonesia (KWI), Perwakilan Umat Buddha di Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Darma di Indonesia (PHDI) dan organisasi keagamaan lainnya yang diakui oleh pemerintah perlu memastikan ketertiban aktivitas organisasi sosial-keagamaan dan pembangunan tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia, untuk menghindari terjadinya konflik antar agama maupun intra agama.
5. Kementerian Agama Republik Indonesia perlu menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam membuat kurikulum pendidikan agama yang lebih mendorong para peserta didik sejak usia dini untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbuka dan memahami adanya keragaman sosial-budaya dan agama dalam masyarakat di Indonesia.

Lalu apa yang dapat atau harus dilakukan, khususnya oleh para pemimpin agama, agar tindakan radikalisme berbasis agama dapat diminimalkan kalau tak dapat dihilangkan? Juergensmeyer mengusulkan sebuah terobosan yakni dengan membarui penghargaan terhadap agama itu sendiri. Yang pertama, memberdayakan agama. Juergensmeyer menengarai bahwa maraknya kasus radikalisme beralaskan agama karena ternyata berbagai tindakan teror itu memberikan kekuatan tersendiri bagi agama-agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama mengalami pelemahan, yang menyebabkan agama membutuhkan kekuatan baru untuk terus berdaya guna dan

berhasil guna. Oleh karena itu, pendidikan teologi mesti dikembangkan ke arah yang lebih konstruktif. Salah satu hal yang harus dikembangkan secara konstruktif adalah penafsiran terhadap ayat-ayat dalam setiap buku suci mengenai apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan. Ayat-ayat yang biasanya digunakan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap pihak lain yang dianggap sebagai ancaman. Agama, ayat-ayat dalam buku suci, kehendak Tuhan atau apa pun sebutannya harus diarahkan pada kemaslahatan umat seluas-luasnya. Mereka yang berbeda tak perlu dilihat atau ditempatkan sebagai ancaman yang harus dimusnahkan apa pun resikonya.

Yang kedua, memelihara ketegangan kreatif antara agama dan negara. Sejak abad ke 18, negara dipandang menjadi antitesis agama. Bahkan modernisasi menyatakan bahwa agama-agama sudah mati. Pada saat yang lain para aktivis keagamaan menyatakan bahwa sekularisme juga sudah mati. Saling klaim antar dua kutub itu pada akhirnya justru menimbulkan berbagai tindak kekerasan. Para pemimpin formal dan para pemimpin agama mesti duduk bersama dan memainkan peran sesuai dengan bagiannya masing-masing. Yang harus dilakukan adalah penguatan dan bukan pelemahan terhadap masing-masing bagian. Yang harus dibangun adalah jembatan bukan tembok. Dengan jembatan maka perbedaan antara ranah agama dan sekuler tetap terjaga sebagai ketegangan yang kreatif.

Yang ketiga, menggantikan semua tindakan kekerasan dengan tindakan yang dilandasi cinta kasih. Ketidaksetujuan dalam berbagai hal adalah keniscayaan hidup. Namun, menyelesaikan ketidaksetujuan yang ada dengan menggunakan kekerasan, hanya akan melahirkan kekerasan yang lain. Oleh karena itu, teror harusnya tidak diselesaikan dengan kontra teror. Sebaliknya, setiap tindak radikalisme harus dihadapi dengan kesediaan untuk memahami mengapa mereka melakukan itu, upaya untuk memulihkan mereka yang menjadi korban kekerasan dan terus mengembangkan sikap cinta kasih. Pada bagian mengembangkan sikap cinta kasih, para pemimpin agama seharusnya memainkan peranan yang lebih besar.

## **Epilog**

Agama, apapun dan di manapun, seharusnya menjadi sumber mata air bukan saja bagi para penganutnya namun juga bagi seluruh insan. Agama, sebagaimana makna



leksikalnya yang berarti tidak kacau, harus mampu menunjukkan serta mewujudkan makna itu seluas-luasnya. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang sama sekali berbeda karena agama justru menjadi sumber air mata. Radikalisme yang berbasis agama sekarang ini seolah menjadi keniscayaan yang tak dapat dihindarkan. Tesis Berger bahwa ketika agama mengalami institusionalisasi maka konflik yang merusak semua sendi kehidupan manusia dapat dengan mudah terjadi mendapatkan pembenarannya. Pada titik ini kita harus berupaya membuktikan bahwa tesis Berger tak sepenuhnya betul. Ini tentu saja bukan upaya yang mudah, tetapi juga bukan tidak mungkin.

Radikalisme berbasis agama sudah mengubah wajah agama yang seharusnya welas asih menjadi wajah yang bengis dan menggetarkan. Radikalisme agama menghadirkan lebih banyak teror daripada damai. Di Indonesia radikalisme makin marak belakangan ini meskipun sejak awal berdirinya Indonesia sebagai bangsa, masalah radikalisme agama sudah mencuat. Salah satu titik kritis adalah ketika para bapak bangsa merumuskan dasar negara. Saat itu ada rumusan yang dituangkan dalam Piagam Jakarta dengan bunyi: “**Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya**” berganti menjadi “**Ketuhanan yang Maha Esa.**” Perubahan atau penghapusan tujuh kata itu sampai saat ini masih belum dapat diterima sepenuhnya oleh sekelompok orang. Hal ini pada gilirannya menjadi bom waktu yang dapat meledak setiap saat. Tenun kebhinnekaan perlu dipertahankan untuk menghadapi segala upaya yang hendak merobek atau bahkan hendak menghancurkannya. Pancasila sebagai dasar negara dengan semua rumusannya sudah final. Setiap upaya untuk mengubah sebagian, salah satu dan atau apalagi seluruhnya adalah ancaman terhadap kebhinnekaan bangsa. Oleh karena itu, semua bentuk radikalisme berbasis agama harus diminimalkan bila tak dapat dihilangkan.

Sesungguhnya setiap kali radikalisme berbasis agama terjadi, muncul sebuah pertanyaan: “Bagaimana mungkin agama menjadi dasar untuk tindak kekerasan yang mengerikan dan menimbulkan ketakutan?” Mark Juergensmeyer menulis sebuah buku dengan judul *Terror in the Mind of God*, yang mungkin dapat menolong kita untuk dapat memahami hubungan antara agama dengan tindak kekerasan yang menjadikan agama sebagai lambarannya. Juergensmeyer menegaskan bahwa agama

memiliki peran yang penting dalam tindak kekerasan tersebut, sebab ternyata agama dapat memberikan pembenaran moral untuk melakukan pembunuhan dan menyediakan berbagai teladan tentang perang kosmik yang memungkinkan para pelaku meyakini bahwa tindakan mereka ada dalam rancangan illahi. Kondisi ini makin diperkuat pada era globalisasi ketika para penguasa formal mengalami penurunan wibawa dan kekuatan penguasa lokal, yang pada umumnya dipegang oleh pemuka agama, mulai menggantikannya. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa teror dengan landasan agama dan kekuasaan sejatinya saling terkait.

Indonesia bukan negara agama. Namun, Indonesia menjadikan agama sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dituangkan secara jelas dalam sila pertama dari Pancasila yang adalah dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tetap memberi ruang bagi agama-agama lokal dan juga enam agama yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini semua menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang berdasarkan agama, tetapi menempatkan agama sebagai salah satu hal mendasar yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, pemerintah ikut terlibat dalam berbagai penentuan hidup keagamaan. Hal ini, pada gilirannya menimbulkan kesulitan tersendiri baik bagi pemerintah mau pun bagi umat beragama jika pemerintah dan para tokoh agama gagal mengelola hidup keagamaan tersebut.

Mengingat bahaya radikalisme berpotensi muncul dalam agama manapun dan dapat terjadi dalam situasi apapun, maka tak ada pilihan lain bagi Kementerian Agama Republik Indonesia selain melakukan upaya antisipasi sejak awal. Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu menyusun kebijakan untuk menanggulangi dan mencegah radikalisme dari hulu hingga hilir dengan melibatkan berbagai kementerian/instansi terkait serta masyarakat luas termasuk di dalamnya organisasi-organisasi sosial-keagamaan. Agama harus dikembalikan pada fitrahnya sebagai sumber mata air perdamaian.

## Referensi

### Buku/Penelitian:

- Berger, Peter. "Religion and Global Civil Society" in Mark Juergensmeyer (ed.), *Religion in Global Civil Society*, Oxford: Oxford University Press, 2005
- Damayanti, Angel. *Inter Religions Conflict and Christian Radical Movements in Poso and Ambon*, UKI: Jakarta, 2011
- Hendropriyono. *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Kompas, 2009
- Hoffman, Bruce. *Inside Terrorism*, New York: Columbia University Press, 2006
- Jerryson, Michael, Mark Juergensmeyer. *Buddhist Warfare*, Oxford: Oxford University Press, 2010, hal. 3
- Juergensmeyer, Mark, Margo Kitts, Michael Jerryson. *The Oxford Handbook of Religion and Violence*, Oxford: Oxford University Press, 2013
- Juergensmeyer, Mark. *The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State*, Californai: University of California Press, 1993
- Juergensmeyer, Mark. *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*, California: University of California Press. 2003
- Levinson, David. "Religion: A cross-cultural dictionary," Oxford: Oxford University Press, 1998
- Pedahzur, Ami, Arie Perliger. *Jewish terrorism in Israel*, New York: Columbia University Press, 2009
- Pegram, Thomas R. *One Hundred Percent American: The Rebirth and Decline of the Ku Klux Klan in the 1920s*, Chicago: Ivan R. Dee, 2011
- Damanik, Rinaldy. *Tragedi Kemanusiaan di Poso*, Poso: PBHI & LPS HAM Sulteng, 2003.

### Website/Internet:

- "Tattered Robes: The State of Ku Klux Klan in the United States,"  
<http://www.adl.org/assets/pdf/combatting-hate/tattered-robres-state-of-ku-2016.pdf>
- <http://www.worldometers.info/world-population/#religions>
- <http://www.asianews.it/news-en/Bangkok:-monks-leading-a-Buddhist-extremist-movement-for-a-confessional-state-35778.html>
- <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/03/186734.htm>
- <http://bigstory.ap.org/article/a8ed212468c741eb993609cd480efe21/ku-klux-klan-dreams-rising-again-150-years-after-founding>
- <https://www.hrw.org/report/2013/04/22/all-you-can-do-pray/crimes-against-humanity-and-ethnic-cleansing-rohingya-muslims>
- <http://www.pusatgidi.org/ind/selayang-pandang-0>
- <http://www.oocities.org/latoehalat/fkm011203.htm>

<http://www.hudson.org/research/4575-hinduism-and-terror>  
[http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/tripura/terrorist\\_outfits/NLFT.HTM](http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/tripura/terrorist_outfits/NLFT.HTM)  
[http://www.stephen-knapp.com/thirteen\\_years\\_of\\_killings\\_in\\_tripura.htm](http://www.stephen-knapp.com/thirteen_years_of_killings_in_tripura.htm)  
<http://www.michr.net/moluccas-sovereignty-front---front-kedaulatan-maluku-fkm.html>  
<http://regional.kompas.com/read/2015/07/19/04543041/Kepala.Kantor.Kemenag.Tolikara.Benarkan.Surat.Edaran.GIDI>  
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150723174315-12-67845/kapolri-beberkan-kronologi-insiden-tolikara/>  
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/11/11/nxmrie365-penolakan-masjid-di-bitung-perkeruh-konflik-rumah-ibadah>  
<http://www.bbc.com/news/world-asia-30930997>  
[http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/25/newsid\\_4167000/4167929.stm](http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/25/newsid_4167000/4167929.stm)  
[http://news.bbc.co.uk/2/hi/south\\_asia/4536199.stm](http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4536199.stm)  
<http://news.liputan6.com/read/2236327/soal-rohingya-walubi-sebut-buddha-di-indonesia-dan-myanmar-beda>  
<http://www.jpost.com/Israel-News/Duma-indictments-expected-today-439195>  
<http://www.haaretz.com/news/who-is-suspected-jewish-terrorist-yaakov-teitel-1.4998>  
<http://www.nytimes.com/1995/11/05/world/assassination-israel-overview-rabin-slain-after-peace-rally-tel-aviv-israeli.html?pagewanted=all>  
<http://www.lionsroar.com/the-rise-of-militant-monks/>  
<http://america.aljazeera.com/opinions/2015/2/myanmars-buddhist-terrorism-problem.html>  
<http://islamlib.com/agama/kristen/trisno-s-sutanto-fundamentalis-kristen-merebak-kuat/>

### **Wawancara:**

Wawancara dengan Pdt. Rinaldy Damanik pada 9 Oktober 2009.

Wawancara dengan Ibu Mietje Saemima, Ketua Gerakan Martha Tiahahu dan Sekretaris Pokja untuk Konflik Maluku, Jakarta, 27 Oktober 2009.

Wawancara melalui email dengan Renata Ticonuwu, S.Th, Sekretaris Jenderal Brigade Manguni pada tanggal 15 April 2010.